



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 760/II/2013

IV/FEBRUARI 2013



**Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden
Sepakati Sejumlah Isu Penting**

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR FEBRUARI 2013

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Minggu terakhir bulan Februari ini diawali dengan Pelantikan/Pengucapan Sumpah Sekjen dan Wakil Sekjen oleh Ketua DPR, dan hari berikutnya Pelantikan/Pengucapan Sumpah Wakil Ketua DPR Korekku dalam Rapat Paripurna Dewan. Rangkuman ini dilengkapi dengan laporan kinerja legislasi dan kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi DPR.

Pelantikan Sekjen dan Wakil Sekjen DPR-RI

Senin, 25 Februari, Ketua DPR telah melantik Sekretaris Jenderal DPR dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan Surat keputusan Presiden No. 23/M TA-HUN 2013. Kekosongan Sekjen DPR diisi oleh Sekjen yang baru Dr. Winantuningtyastiti Swasanani Msi., dan Wakil Sekjen dijabat oleh Ahmad Djuned SH., MH. Pelantikan kedua pejabat ini disaksikan oleh tiga Wakil Ketua DPR, Sekjen MPR, Wasekjen DPD, dan para pejabat di lingkungan Sekjen DPR. Dalam sambutannya, Ketua DPR memberikan beberapa poin penekanan ditujukan kepada kedua pejabat baru. *Pertama*, bahwa jabatan Wasekjen adalah jabatan yang diisi kembali setelah beberapa tahun tidak diisi. Jabatan ini diisi kembali karena usulan Pimpinan DPR kepada Presiden sehubungan dengan volume kegiatan Dewan yang makin lama makin meningkat. Volume beban tugas yang demikian besar, perlu didukung oleh kinerja optimal, oleh karena itu, Sekjen harus dibantu oleh Wasekjen. Melalui Tim Penilai Akhir /Baperjanas yang diketuai oleh Wakil Presiden, akhirnya, jabatan wakil sekjen disetujui untuk diisi.

Kedua, Ketua DPR meminta bahwa semua jajaran Sekretariat Jenderal harus memberikan dukungan kepada Pimpinan yang baru dalam melaksanakan Tupoksinya agar manaje-



men organisasi dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, perlu dilakukan pembagian tugas yang jelas antara Sekjen dan Wasekjen dalam memberikan dukungan sebagai *supporting system*. Jangan sampai terjadi “matahari kembar”.

Keempat, dalam melaksanakan tugas, harus menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab serta profesionalitas. Walaupun nanti Dewan periode 2009-2014 akan berakhir Oktober 2014, namun tugas kedua pejabat ini tetap berlanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelima, kepada pejabat lama, Dra. Nining Indra Saleh, yang telah melaksanakan tugas sebagai Sekjen selama lima tahun dan hampir tiga tahun selama kepemimpinan Ketua DPR Marzuki Alie, disampaikan ucapan terimakasih atas dharma-bhaktinya kepada Dewan dan diucapkan selamat melaksanakan tugas bagi bangsa dan negara sesuai pilihan politiknya.

Pelantikan/Pengucapan Sumpah Wakil Ketua DPR Korekku

Sesuai dengan Surat Keputusan DPR-RI No. 04/DPR-RI/III/2012-2013, maka Mohamad Sohibul Iman, PhD. Telah ditetapkan menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan

menggantikan Anis Matta Lc. yang mengundurkan diri dan pengusulan penggantian dilakukan oleh DPP PKS dengan Surat Keputusan DPP PKS, tertanggal 11 Februari 2013.

Pengucapan sumpah dilakukan dihadapan Sidang Paripurna DPR dan dihadiri para undangan. Dalam sambutannya, Ketua DPR menyampaikan beberapa hal diantaranya, *pertama*, sebagai Wakil Ketua DPR yang baru Pimpinan meyakini bahwa Saudara Sohibul Iman mampu segera menyesuaikan diri dengan tugasnya yang baru, didasari atas pengalaman yang demikian banyak, yang dimiliki sejak menjabat sebagai anggota DPR tahun 2009.

Kedua, tugas kepemimpinan di lembaga DPR ini merupakan sebuah amanah mulia yang menuntut tanggungjawab yang tinggi, yang harus senantiasa dijaga dan ditunaikan seoptimal mungkin. Tanggungjawab ini benar-benar harus kita pahami dan laksanakan, lebih-lebih tahun 2013 ini adalah tahun yang sangat “kritis” tahun politik menjelang dilaksanakannya Pemilu 2014. Seluruh anggota Dewan, terutama Pimpinan Dewan harus benar-benar menjaga, agar tugas pokok Dewan ini harus dinomorsatukan daripada tugas-tugas diluar kedewanan. Kinerja Dewan selama ini dinilai masih jauh dari harapan masyarakat, khususnya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kedewanan terutama di bidang legislasi. Namun demikian, fungsi di bidang anggaran, juga tidak kalah penting.

Ketiga, Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, akan mengkoordinasikan kegiatan anggaran yang cukup padat. Tugas dan fungsi anggaran ini, memiliki agenda yang sangat “rigid”, karena UU MD3 maupun Tata Tertib DPR mengatur secara jelas mengenai siklus pembahasan APBN di DPR, pembahasan laporan semester, pembahasan pertanggungjawaban APBN dan juga pembahasan APBN Perubahan dan Tambahan. Kita semua harus menyadari bahwa hanya dengan kerja keras menjalankan amanat rakyat, maka kepercayaan terhadap DPR tetap tinggi.

Dalam Rapat Paripurna DPR hari yang sama, Ketua DPR mengumumkan adanya dua surat masuk dari Presiden, tertanggal 20 Februari 2013, perihal penyampaian nama-nama Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan surat tertanggal 22 Februari 2013 perihal Usul Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia.

Kegiatan Bidang Legislasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang legislasi, Komisi, Pansus dan Baleg masih melanjutkan pembahasan atas beberapa RUU yang telah masuk dalam Program Prioritas tahun 2013, khususnya yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I. Karena tahun 2013

dianggap tahun yang cukup kritis dalam pelaksanaan fungsi legislasi, maka Pimpinan DPR telah melakukan pertemuan konsultasi dengan Presiden RI di Istana Negara, pada Senin 25 Februari, membahas pelaksanaan fungsi legislasi berikut kendala yang dihadapi. Pimpinan DPR berupaya untuk merespon kritik masyarakat bahwa pelaksanaan fungsi legislasi selama ini masih dinilai rendah. Karena pelaksanaan fungsi ini tidak semata tanggung jawab DPR, tetapi juga tanggung jawab pemerintah, maka semua hambatan dalam pelaksanaan fungsi ini dibicarakan secara matang dengan Presiden. Beberapa RUU yang dianggap cukup krusial yang belum menemukan kata sepakat atas berbagai substansi, antara lain RUU Ormas, RUU Kamnas, RUU Pemda, RUU Desa, dan RUU Pemilukada. Juga beberapa RUU yang merupakan penerjemahan dari UU Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pertemuan yang berlangsung cukup intensif akan ditindaklanjuti dalam pembahasan-pembahasan antara DPR dan Pemerintah.

Dalam pertemuan konsultasi juga dibicarakan mengenai upaya bersama dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui DPR; dan agenda percepatan pembahasan RAPBN Perubahan 2013.

Kegiatan Bidang Pengawasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan telah dilakukan oleh beberapa Komisi, diantaranya oleh Komisi VII DPR RI yang melakukan rapat intensif, dengan agenda evaluasi kinerja tahun 2012 dan rencana kerja 2013. Rapat-rapat dilakukan pada pertengahan minggu kedua dan ketiga Februari. Rapat dilakukan dengan [1] Dirut PT. Pertamina, [2] Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, [3] Kepala BPH Migas, [4] Dirut PT. Aneka Tambang (Persero. Tbk), [5] dirut PT. Timah (persero Tbk).

Dengan Dirut PT. Pertamina, Komisi VII antara lain menyimpulkan: [1] memberikan apresiasi terhadap capaian kerja PT. Pertamina tahun 2012 yang ditunjukkan dengan peningkatan laba bersih, deviden, penerimaan negara, kenaikan produksi dan tingkat kesehatan perusahaan; [2] PT. Pertamina diminta melakukan kajian secara komprehensif atas pelaksanaan pengendalian BBM bersubsidi dengan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi untuk konsumen tertentu maupun pembatasan penyaluran BBM bersubsidi melalui pemanfaatan teknologi IT dan melakukan persiapan untuk pelaksanaan tahun 2013; [3] Kepada PT. Pertamina diminta memberikan rencana kerja 2013 dengan lebih detail dan komprehensif dengan parameter *world class company*.

Dengan Menteri ESDM, mengambil keputusan antara lain: [1] terkait dengan rendahnya realisasi anggaran Kementerian ESDM sebesar 59,78% Komisi VII men-

desak agar menteri ESDM mengambil tindakan tegas kepada unit yang memiliki kinerja rendah, diantaranya Ditjen Migas (41,97%), Ditjen EBTKE (49,15%), BPH Migas (48,48%), dan PT. PLN (Persero) (57,06%), serta menyerahkan hasil penilaian UKP4 tahun 2012 kepada Komisi VII DPR-RI. [2] Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk mempertimbangkan kemungkinan pengalihan anggaran PT. PLN yang realisasi kinerjanya jauh dibawah target setiap tahun untuk pengembangan program prioritas ESDM. Dengan catatan dari Fraksi PDI-P: agar menitikberatkan pada peningkatan rasio elektrifikasi dan pemerataan elektrifikasi bagi provinsi yang rasio elektrifikasinya masih rendah. [3] Komisi VII mendesak menteri ESDM untuk mempercepat renegotiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai amanat UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Diplomasi Parlemen

Speaker Parlemen Sudan **HE. Mr. Ahmed Ibrahim AL-Tahir beserta delegasi** datang ke DPR-RI pada Senin, 25 Februari, pada acara kunjungan kehormatan. Ketua DPR-RI menyampaikan selamat datang dan menyampaikan beberapa hal, termasuk ucapan selamat atas terpilihnya Ketua Parlemen Sudan sebagai Presiden PUIC ke VIII, yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi hubungan Indonesia dengan Sudan. Ketua DPR-RI juga menyampaikan permohonan maaf

atas ketidakhadirannya dalam konferensi PUIC di Sudan. Kepemimpinan Ketua DPR-RI sebagai Presiden PUIC VII, antara lain telah mengunjungi negara-negara yang sedang menjalankan demokrasi yaitu ke Tunisia dan Mesir, juga telah berkunjung ke Gaza (Palestina) untuk memberikan dukungan kemerdekaan bagi negara tersebut, melakukan dialog antar agama (*Interfaith Dialogue*) yang bertema: “Peran parlemen dalam mengembangkan kerjasama antar keyakinan dan antar budaya”, yang melibatkan anggota-anggota parlemen dari 34 negara, organisasi keagamaan, tokoh nasional dan internasional serta para pakar yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali, Indonesia.

Beberapa hal yang disampaikan delegasi Sudan, antara lain rasa kehilangan dengan ketidakhadiran Ketua DPR-RI/Presiden PUIC VII di Sudan, dan memahami dengan ketidakhadiran Ketua DPR-RI dalam konferensi tersebut serta telah menerima utusan dari Ketua DPR-RI dan telah disampaikan dalam konferensi. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Kepemimpinan PUIC mendatang adalah menjaga hubungan yang baik antara Turki dan Mesir, penyelesaian terhadap kasus Rohingya dan pemulihan di Mali, Somalia, serta Sudan Selatan, usulan dari Uni Emirat Arab tentang pandangan perlunya pembentukan Parlemen Islam. Terkait hubungan antara dua negara Indonesia dan Sudan yang harmonis diharapkan tidak hanya sampai kepada hubungan politik, akan tetapi dapat mencakup hubungan dibidang Sosial dan Ekonomi guna menguatkan hubungan diantara kedua negara.**

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden Sepakati Sejumlah Isu Penting



Ketua DPR Marzuki Alie memberikan keterangan pers usai konsultasi dengan Presiden RI.

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/2) sepakat untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target legislasi tahun ini. Ketua DPR Marzuki Alie dalam pertemuan tersebut didampingi tiga Wakil Ketua yaitu Pramono Anung, Priyo Budi Santoso dan Taufik Kurniawan. Sementara Presiden SBY didampingi tiga Menko yaitu Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono dan Mensesneg Sudi Silalahi.

Ketua DPR Marzuki Alie usai rapat konsultasi kepada sejumlah wartawan menjelaskan, dalam acara itu dibicarakan beberapa hal diantaranya terkait hambatan DPR dalam menyelesaikan UU. Ada 8 (delapan) UU dan ada tambahan dari Presiden dan juga dari Pimpinan Dewan lainnya.



“Kita akan tindak lanjuti agar produktivitas legislasi pada masa sidang ini dapat meningkat, artinya kita merespon kritik masyarakat bahwa masalah legislasi pada tahun politik ini diperkirakan akan lebih rendah. Kami berusaha mengkonsultasikan dengan Presiden karena legislasi ini bukan hanya tanggung jawab DPR tapi juga tanggung jawab pemerintah,” jelas Marzuki.

Selain itu, Dewan menyampaikan terkait program aspirasi bahwa anggota DPR setiap saat menerima aspirasi dari masyarakat terkait persoalan yang ada di daerah. Dewan juga punya rumah aspirasi di daerah menampung aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan. Kemudian anggota DPR setiap kali diangkat selalu disumpah akan memperjuangkan aspirasi. Untuk itu disepakati bahwa program aspirasi ini akan dicari ruangannya.

“Kita tidak bicara dana tapi kita bicara bagaimana tuntutan masyarakat ini bisa kita salurkan kepada pemerintah sehingga masyarakat merasakan keterwakilan dari pada kami yang berada di DPR. Selama ini masyarakat tidak merasa terwakili oleh kami di DPR. Kenapa? apapun yang disampaikan masyarakat seolah-olah kami tidak melakukannya, namun dengan kesepakatan ini bahwa kami sebagai wakil rakyat di dapil kami betul-betul dapat memperjuangkan aspirasi dan pemerintah akan meresponnya,” katanya.

Masalah lain menurut Ketua DPR membicarakan bagaimana penguatan industri alutsista dalam negeri. Pemerintah agar berusaha maksimal untuk menggunakan alutsista hasil industri dalam negeri kecuali alutsista yang tidak mampu diproduksi di dalam negeri. Disepakati bahwa pemerintah akan sangat selektif menggunakan kredit ekspor dengan berbagai pertimbangan.

Pemerintah sepakat bahwa Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI harus di perkuat dalam memberikan informasi kepada rakyat tepat waktu dan akurat. Tidak seperti kejadian sekarang ini, TVRI dan RRI seperti

tidak mendapat perhatian sama sekali padahal ini adalah hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang dikerjakan lembaga negara lainnya.

Mengenai tindak lanjut UU BPJS, DPR mengingatkan ada beberapa rancangan peraturan pemerintah yang belum diselesaikan oleh pemerintah yang seharusnya selesai pada tahun 2012 lalu. Pemerintah sudah berjanji insyaAllah, 1 Januari nanti pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah bisa dilaksanakan.

Ketua DPR mengemukakan, dalam pertemuan tersebut disinggung tentang APBN-P, dewan memberikan ruang kepada pemerintah apabila ada asumsi makro ekonomi yang tidak sesuai lagi dengan APBN yang disahkan, pemerintah diminta untuk mempercepat pembahasan APBN-P. Dengan demikian ada kesempatan bagi para pelaksana untuk melaksanakan APBN-P itu sesuai peraturan yang berlaku.” Apabila APBN-P disahkan terlambat maka ada kemungkinan terjadi pelanggaran administrasi yang mengakibatkan penguna anggaran terjerat kasus hukum,” jelasnya.

Ada masukan dari Wakil Ketua DPR Pramono Anung terkait masa depan Indonesia terkait dengan *high cost politic* dan disetujui oleh Presiden. “Kita tidak bicara masa jabatan kita saja tapi juga masa depan bangsa. Disepakati bagaimana kita merumuskan satu UU yang tidak *high cost* dan kita mendapatkan orang-orang yang duduk sebagai negarawan bukan sebagai investor. Kami akan menyampaikan kepada alat kelengkapan yang ada di dewan apa yang dibicarakan dengan pemerintah ini,” papar Marzuki.

Menyangkut satuan tiga dalam pembahasan APBN, Pimpinan Dewan menyatakan pihaknya mencoba mencari pemahaman bagaimana peran DPR menyangkut satuan 3 ini dapat dikurangi, tetapi fungsi pengawasannya tetap sampai satuan 3. Sehingga pemerintah punya fleksibilitas dalam melaksanakan APBN, yang penting sasarannya tercapai. (iky), foto : hindra/parle/hr.

Timwas DPR Dorong KPK Lakukan Penyidikan Menyeluruh Pihak yang Terlibat

Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century DPR mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan secara menyeluruh terhadap semua pihak yang terindikasi terlibat kasus korupsi Bank Century, sepanjang didukung dengan alat-alat bukti yang cukup, mengingat keputusan Bank Indonesia berasaskan kolektif kolegial.

Demikian kesimpulan rapat Timwas Century DPR

dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta, Rabu (27/2) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, posisi kasus Bank Century adalah tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang dilakukan tersangka BM selaku Deputi Bidang IV dan kawan-kawan.



Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Busyro Muqodas menghadiri rapat dengan Timwas DPR.

Megenai kegiatan penyidikan, KPK telah melakukan pemeriksaan dan penjadwalan pemanggilan saksi sampai dengan akhir Februari 2013 sebanyak 14 orang. Rencana berikutnya adalah pendalaman dokumen hasil penyelidikan, kemudian dilakukan penyitaan dokumen serta diskusi dengan nara sumber atau ahli perbankan serta meminta keterangan ahli. Setelah itu, pemeriksaan saksi dan ahli dilanjutkan pemeriksaan tersangka dan audit perhitungan kerugian keuangan negara.

Ditambahkan, dalam penyelidikan KPK telah meminta *second opinion* atas tersangka SJF dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kesimpulannya adalah SJF dalam kondisi tidak cakap (tidak kompeten untuk menjalani pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum. “ Karena itu sampai hari ini, KPK secara *administrative* belum menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap SJF,” tandasnya.

Dalam acara ini sebagian besar fraksi di Timwas mempertanyakan mengapa KPK belum menetapkan tersangka seluruh Dewan Gubernur BI padahal kebijakan yang dikeluarkan sifatnya kolektif kolegial. Hingga kini KPK baru menetapkan Budi Mulya dan SJF namun yang terakhir ini dalam kondisi sakit.

Menurut Abraham Samad yang didampingi Wakil Ketua Zulkarnain dan Busyro Muqodas, KPK perlu bukti lebih akurat untuk menetapkan Dewan Gubernur BI lain berdasarkan alat bukti yang ditemukan. Ia juga menangkap kesan anggota Timwas DPR melihat KPK terlalu lambat untuk mengusut kasus ini sampai ke atas.

“Sampai hari ini KPK belum dapat mengambil kesimpulan tentang keterlibatan anggota Dewan Gubernur BI lain apabila belum memeriksa Budi Mulya sebagai tersangka,” jelas Samad. Dikemukakannya, tidak menutup kemungkinan Deputy Gubernur BI lain untuk menjadi tersangka.

Karena itu lanjutnya, KPK butuh keterangan dari tersangka sehingga sampai kini belum menetapkan tersangka baru, kalau belum ada dua alat bukti yang cukup.

“Saya mohon kepada anggota DPR tolong kita diberi kesempatan dan bapak-bapak bersabar menunggu dan mengikuti perkembangan terus agar supaya kasus ini bisa dibuka secara transparan,” terang Samad menambahkan.

(mp) foto: iw/parle.



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memimpin rapat Timwas Century DPR dengan KPK.

Komisi X dan Pemerintah Sepakat Perpanjang Pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran

Rapat Paripurna DPR menyepakati untuk memperpanjang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, semula diharapkan selesai tahun 2012 diperpanjang sampai akhir masa persidangan 2012/2013 atau bulan Agustus 2013. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Moham-

mad Nuh, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (26/2) sore.

Syamsul Bachri mengatakan, Komisi X DPR bersama-sama pemerintah sepakat untuk merevisi hasil Keputusan Rapat Kerja antara Komisi X DPR dengan Mendikbud tanggal 10 April 2012. Revisi perpanjangan waktu ini dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan atas draft Rancangan Undang-Undang

tentang Pendidikan Kedokteran disinkronkan dengan Undang-Undang no.12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat Kerja ini merupakan kelanjutan rapat yang lalu, maka Komisi X DPR hanya mendengarkan pemaparan pemerintah yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang materi-materi yang

akan dibahas maupun yang akan disempurnakan dan untuk selanjutnya akan dibawa ke Panitia Kerja (Panja).

Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, RUU Pendidikan Kedokteran telah dibahas bersama dengan Presiden, dan dihadiri Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, serta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, dan disepakati untuk segera dirampungkan.

Moh. Nuh menegaskan, Pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran bersama-sama dengan Komisi X DPR dan berharap mudah-mudahan RUU Dikdok ini dapat dituntaskan dan segera dapat disahkan.

Dia menegaskan, Rancangan Undang-Undang Dikdok ini adalah Ini-



Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri berjabat tangan dengan Mendikbud M. Nuh usai raker, Selasa (26/2).

siatif DPR sudah cukup lama, mengingat jika disandingkan antara draf yang lama dengan RUU Pendidikan Tinggi (Dikti) ada beberapa yang *overlapping*. Oleh karena itu RUU Dikdok perlu ditata kembali dise-

suaikan dengan konsideran yang dipakai yaitu Undang-Undang No. 24 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) yang akan diterapkan pada tanggal 1 Januari 2014. (spy/doc/pale.

Partisipasi Masyarakat dalam RUU Advokat Berlebihan

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Endang Agustini Syarwan Hamid, meminta penjelasan mengenai tugas notaris dan tugas advokat sehingga perlu diberi status sebagai pejabat negara dibandingkan sebagai penegak hukum.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi paparan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, dalam rapat dengar pendapat Baleg DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah dalam rangka mencari masukan bagi RUU Advokat, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/2)

Endang juga mempertanyakan partisipasi masyarakat dan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dalam RUU Advokat.

“Bagaimana partisipasi masyarakat berkaitan dengan banyaknya LSM, dimana kita tidak bisa mengklasifikasikan LSM yang mana yang baik dan tidak. Bagaimana sebaiknya dengan peran partisipasi masyarakat itu,” kata Endang.

“Dan bagaimana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Terus terang saja peran advokat belum begitu banyak terdengar padahal jika kita lihat persoalan tanah warisan dan lain-lain yang berkembang

di masyarakat ke b a n y a k a n masyarakat menengah ke bawah bahkan mereka sampai berantem, saya tidak lihat sedikit pun peran advokat disitu,” tambahnya.

Menanggapi pertanyaan Endang, Romli At-

masmita Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran menyatakan bahwa di konferensi PBB yang sering diikutinya, partisipasi itu hanya pada tindak pidana saja. Tidak ada ketentuan dalam konvensi adanya partisipasi masyarakat didalam kelembagaan negara termasuk profesi advokat.

Partisipasi masyarakat, menurutnya, sekedar untuk meng-encourage masyarakat. Masyarakat didayagunakan untuk berani melaporkan dalam pemberantasan sesuatu kejahatan. Tapi bukan memberdayakan organisasi advokat. Itu tugasnya majelis kode etik dan



Anggota Badan Legislasi DPR RI, Endang Agustini Syarwan Hamid.



Wakil Ketua Baleg DPR Dimiyati Natakusumah.

pengurusnya itu sendiri.

Menurut Romli, Bab mengenai partisipasi masyarakat agak kebablasan dan tidak patut sehubungan dengan posisi advokat sebagai *officium nobile*. Bentuk partisipasi masyarakat yang kemudian akan menjadi beban pekerjaan tersendiri bagi organisasi advokat.

Mengenai pemberian status sebagai pejabat negara, Romli menyatakan kenapa status pejabat negara itu penting, agar memiliki kewibawaan yang lebih.

“Tapi jika itu memiliki suatu kemungkinan silakan, tapi kalau tidak, jika mau membuat ketentuan-ketentuan dan sanksi terhadap mereka yang menghalangi tugas advokat,” kata Romli.

Jika polisi dan jaksa saja bisa mengatakan anda menghalangi penyidikan dan penuntutan, mengapa jika menghalangi tugas advokat tidak ada sanksi. Ini *Equality*nya kata Romli. Maksudnya, terpaksa harus dibuat seperti ini, karena situasi di Indonesia agak berbeda dengan negara-negara maju lainnya. “Sampai harus ada sanksi-sanksi seperti itu padahal sudah di sumpah itu semua. Mungkin harus ada semacam ketentuan-ketentuan yang khusus Indonesia,” papar Romli.

Terkait Bantuan Hukum, menurut Romli, tentunya harus dibedakan antara *Legal Aid* dan *Legal Services*. Maksudnya, dikhawatirkan bagi yang miskin begitu mendengar pengacara langsung mundur karena merasa harus ada pembayaran yang tidak jelas. Oleh karena itu kalau memang ingin jelas kalau disetujui oleh para advokat, harus ada ketentuan minimal honorarium di dalam UU ini, sehingga jelas bagi masyarakat apakah dirinya mampu atau tidak.

“Sekedar mengingatkan kemarin bahwa BPHN telah mengucurkan dana sebesar 53 M untuk bantuan hukum ke seluruh LBH di Indonesia,” infonya. (sc) foto:od/parle.

DPR Dukung Perbaikan Pelayanan Transportasi Laut



Anggota Komisi V DPR RI Mohammad Syahfan Badri Sampurno.

DPR mendukung rencana Kementerian Perhubungan (Kemhub) pada tahun ini akan mengoperasikan 18 kapal yang terdiri atas 14 kapal *roll on roll off* (ro-ro) dan empat unit kapal perintis dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan transportasi laut.

“Saya sangat mengapresiasi rencana Kemhub menambah armada 14 kapal Roro dan empat unit kapal perintis tahun ini,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Mohammad Syahfan Badri Sampurno, di sela-sela Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, (26/2).

Terkait dengan infrastruktur perhubungan laut, Syahfan mengatakan, masih belum optimal, karena masih minimnya armada kapal. Selain itu, Syahfan juga menyoroti seringnya terjadi antrian panjang berkilo-kilo meter truk-truk pengangkut barang seperti pada penyebrangan antara pelabuhan Merak-Bakauheni. Secara jelas, sangat merugikan berbagai pihak baik pengusaha angkutan maupun pemerintah.

“Selama ini, saya menilai kurangnya armada kapal menjadi faktor pemicu sering terjadinya antrian

panjang truk-truk seperti di pelabuhan Merak-Bakauheni,” ujar Wakil Ketua BURT ini.

Selain itu, Syahfan juga sepekat dengan upaya pemerintah memperbaiki konektivitas logistik nasional dalam menekan tingginya ongkos transportasi. Sehingga dapat menyamakan standar harga logistik antara kawasan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian Timur.

Sebagaimana kita perhatikan selama ini akibat biaya ongkos transportasi laut yang tinggi. Mengakibatkan harga-harga logistik sangat mahal di kawasan Indonesia Timur. “Saya setuju dengan upaya pemerintah memperbaiki konektivitas logistik nasional guna menekan tingginya ongkos transportasi khususnya di kawasan Indonesia Timur. (si) foto:doc/parle.

Produk Rotan Harus Dikelola Secara Terpadu

Industri rotan Indonesia disinyalir kalah bersaing dengan negara-negara Asia lainnya, karena kurangnya inovasi terutama untuk bidang *furniture*. Sebelum ada regulasi yang baru, bahan baku rotan kita bebas di ekspor ke luar negeri. Negara Cina paling mampu menerapkan inovasi desain produk rotan untuk *furniture* yang bahan bakunya justru dari Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI Atte Sugandi (F-PD) mengatakan, “Kalau kalah bersaing saya kira tidak. Bahan baku rotan kita nomor satu di dunia,” katanya kepada Parlementaria, Selasa (26/2). Kalau untuk desain produk rotan, kata Atte, Indonesia memang kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Sejak tahun 1960-1970an semua jenis rotan Indonesia masih bebas diekspor. Kini, sudah ada pem-

batasan ekspor bahan baku rotan. Ada jenis rotan tertentu seperti manong, yaitu jenis rotan besar yang dilarang untuk diekspor. Selama ini banyak bahan baku rotan dari Indonesia dipasarkan ke negara-negara Asia seperti Cina. Dan ternyata, bahan baku rotan Indonesia itu dijadikan produk *furniture* yang menarik dan di ekspor ke Amerika oleh Cina.

Ironis, sebagai negara yang memiliki kekayaan rotan melimpah, justru kalah bersaing dalam hal inovasi produk rotan. Cina telah berinovasi lebih jauh dengan menghasilkan desain *furniture* yang kreatif yang bahan bakunya dari Indonesia. Menurut Atte, perlu ada pengelolaan secara terpadu industri rotan nasional.

Jadi, para produsen rotan harus bekerja sama dengan kalangan



Anggota Komisi VI DPR RI Atte Sugandi.

perguruan tinggi untuk mengelola inovasi produk berbahan dasar rotan. Sehingga, ke depan Indonesia punya desain-desain menarik untuk kerajinan dan *furniture*. “Gimana pun juga desain itu harus menyesuaikan dengan keinginan pasar.”
(mh)/foto:iwan armanias/parle.

BK Awasi Ketat Absensi Anggota Dewan



Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Muhammad Prakosa.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Muhammad Prakosa mengatakan, mulai sidang Paripurna DPR pada Selasa (26/2) ini, BK meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap tingkat kehadiran anggota dewan. Fungsi pengawasan yang dilakukan BK bukan hanya melalui absen sidik jari ataupun tanda tangan, tetapi

memastikan anggota dewan benar-benar menghadiri rapat.

“Rapat paripurna merupakan rapat tunggal, sehingga kita akan lakukan pengawasan yang ketat di dalam rapat paripurna, karena banyak sekali anggota yang absen atau pergi dengan alasan yang tidak jelas. Untuk meningkatkan kedisiplinan, BK akan buat suatu edaran kepada fraksi dan juga anggota bahwa kita akan mulai monitoring terhadap rapat-rapat paripurna terkait dengan kehadiran,” jelas Prakosa ketika ditemui Tim Parle sebelum rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan (26/2).

BK melihat adanya kebutuhan untuk lebih memperketat pengawasan absensi terutama di sidang utama, karena merupakan sidang tunggal. Untuk sidang komisi, harus menunggu dari manajemen rapat, karena satu anggota komisi bisa terlibat dalam beberapa kali rapat sehingga data harus dirapihkan terlebih dahulu.

“Kita melihat ada sejumlah anggota yang selalu ada tanda tangannya di daftar hadir, tetapi kita tidak pernah melihat sekalipun muncul di rapat paripurna.

Bahkan, juga ada di alat kehadiran elektronik, tetapi selama ini tidak pernah nampak di ruang sidang,” ujar Prakosa.

Prakosa menilai penertiban ini agar semua anggota dewan selalu disiplin bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas kedewanan dan juga menjaga citra dan martabat DPR. Mengenai sanksi yang akan diber-

lakukan kepada anggota, tentu akan dilakukan dengan mekanisme dan aturan yang ada. BK juga akan menerapkan sanksi yang lain, misalnya BK akan menempel di papan pengumuman mengenai anggota-anggota yang sering mangkir di sidang paripurna meskipun ada tanda tangan di kehadiran.(sf,vi)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi IX DPR Tekankan Kualitas Perlindungan Pekerja di Luar Negeri



Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh.

DPR tidak menargetkan kapan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) akan diselesaikan apakah tahun ini atau tahun depan. “Bagi saya bukan target waktu, tetapi kualitas perlindungan kepada pekerja Indonesia di luar negeri,” tandas anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh dalam acara mingguan Forum Legislasi di Press Room DPR Selasa (26/2).

Dalam acara ini tampil pula anggota DPD Istibsjaroh dan Erni Murniati dari Serikat Buruh Migran membahas RUU PPILN.

Poempida mengatakan, Komisi IX DPR tidak mematok waktu penyelesaian karena lebih mengedepankan kualitas. Ia mengakui DPR bisa saja menyelesaikan RUU ini secepatnya dengan kesepakatan bersama pemerintah, namun kalau akhirnya dimantahkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), malah menjadi masalah.

Namun lanjutnya, mengingat adanya sekitar 500 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pembahasan

RUU PPILN mengalami hambatan. “Ini menjadi PR bagi Pansus untuk merumuskan dan mensinergikan RUU ini. Kalau *grand design*nya tidak sama bisa panjang,” ungkap Poempida.

Politisi Golkar ini mengusulkan, untuk memberikan perlindungan kepada pekerja di luar negeri, perlu dibentuk tiga badan, yakni badan penempatan mencakup rekrutmen dan pelatihan, badan perlindungan yang sifatnya terpisah dan tak kalah penting adalah badan pendataan. Badan pendataan ini hampir mirip PPATK, yang benar-benar memantau arus ke mana TKI.

“Dengan adanya data-data akurat maka jika terjadi masalah apapun, termasuk masalah hukum maka KJRI bisa segera membantu menyelesaikan,” terangnya.

Prof. DR. Dra. Hj. Istibsjaroh anggota DPD asal Jawa Timur mengatakan, berbagai masalah yang dialami TKI di luar negeri bersumber dari soal pembekalan untuk berangkat yang kurang termasuk pembekalan hukum. Masalah lain karena TKI tidak dijemput majikan, juga tidak ada fasilitas yang layak untuk pekerja dan gaji yang tidak dibayar.

Di sisi lain, sambungnya, meski untuk meningkatkan devisa, rekrutmen harus dilakukan dengan legal. Kalau ilegal maka banyak terjadi penyimpangan seperti TKI di bawah umur, dilacurkan dan dijual. Calon TKI juga harus dibekali masalah hukum, sementara PPTKI harus diperbaiki jangan seenaknya mere-

krut calon TKI.

Sementara Erna Murniati dari Serikat Buruh Migran Indonesia menyatakan, RUU PPILN sebagai revisi UU 39/2004 diharapkan akan lebih baik dan meningkat lagi dalam perlindungan kepada pekerja. Harapan lain perlingkungannya harus ditingkatkan dan terutama



Anggota DPD Prof. DR. Dra. Hj. Istibsjaroh.

pemerintah hingga ke desa yakni RT dan RW harus terlibat. Pasalnya akar masalahnya dari desa, kalau dari awal saja tidak benar maka selanjutnya akan salah terus. “Pengawasan harus diperketat termasuk pendidikan keterampilan yang harus diikuti,” katanya.

Ia menyebut contoh, ada TKI yang tidak mengikuti pendidikan hanya mengisi formulir setelah 2 pekan terus diberangkatkan. Ia juga menekankan, jangan sampai pembekalan ke luar negeri hanya asal jadi. “Dengan pengawasan ketat akan mudah dipantau kalau terjadi masalah,” ujar Erna yang pernah menjadi TKI di Hongkong. (mp) foto: hindra/parle.

Mohamad Sohibul Iman Resmi Jabat Wakil Ketua DPR



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman dan Anis Matta.

Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda tunggal pengambilan sumpah Wakil Ketua DPR RI yang baru dibuka Selasa, (26/2), pukul 10.30 WIB. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi empat wakil ketuanya, berlangsung singkat dengan dihadiri 293 anggota dewan dari 560 anggota. Rapat Paripurna ini merupakan yang ke-17 pada masa sidang III 2012-2013.

Mohamad Sohibul Iman (F-PKS) dilantik sekaligus diambil sumpahnya dalam rapat tersebut. Seperti diketahui, ia menggantikan Wakil Ketua DPR M. Anis Matta yang mengundurkan diri. Kini, Sohibul Iman resmi menduduki jabatan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan untuk masa bakti 2009-2014.

Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengharapkan agar Sohibul Iman segera menyesuaikan diri sebagai pimpinan DPR. “Mudah-mudahan kehadiran Sohibul Iman dapat memperkuat kepemimpinan DPR,” ucap Marzuki. Sohibul Iman sendiri bukan orang asing di DPR, ia banyak berkiprah di beberapa Komisi DPR, di antaranya Komisi XI, VII, dan VI.

Sementara latar belakangnya sebelum menjadi anggota DPR ialah, dia pernah menjadi rektor Universitas Paramadina dan peneliti di BPPT. Dalam kesempatan yang sama, Marzuki juga menyampaikan terima kasihnya kepada Anis Matta yang sudah berkiprah sebagai pimpinan DPR.

Usai dilantik, kepada pers, Sohibul Iman juga mengatakan, tugasnya sebagai wakil ketua DPR lebih berat ketimbang menjadi anggota biasa. Menurutnya, dengan sudah dilantik ini, mudah-mudahan kerja dewan jadi lebih optimal. “Ini hanya proses legal formal,” katanya. (mh)/foto: iw, hr, od/parle/hr.

Kementerian Keuangan Dukung UU PPDK

Kementerian Keuangan RI mendukung sekaligus memberi masukan pada Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK).

Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar dalam raker dengan Pansus RUU PPDK Rabu (27/2) siang mengaku dapat memahami alasan DPR RI yang mengambil inisiatif untuk membentuk RUU PPDK dengan salah satu pertimbangan wilayah tersebut masih tertinggal, sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Hal tersebut menurut Mahendra sejalan dengan apa yang dilakukan Kementerian Keuangan yang telah mengalokasikan dana untuk daerah kepulauan. Namun karena sarana di sana kurang memadai menyebabkan daerah tersebut masih kurang berkembang dibanding daerah lainnya.

“Jangkauan listrik di daerah kepulauan saja misalnya,



Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar berjabat tangan dengan Wakil Ketua Pansus RUU PPDK Alex Litaay.

sangat sulit. Hal tersebut karena di daerah kepulauan masih menggunakan solar, seperti diketahui harga solar sangat mahal, karena memang transportasi di sana yang sangat sulit,” jelas Mahendra.

Ditambahkan Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, diperlukan dana lebih bagi daerah kepulauan dalam mengejar ketertinggalannya. Namun, hal tersebut bukan berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum), melainkan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Apa yang diungkapkan Bambang menurut Wakil Ketua Pansus RUU PPD, Alexander Litaay, sudah tercantum dalam RUU PPD Pasal 32, yakni Penerimaan Daerah Kepulauan untuk Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf C diperoleh dari penerimaan khusus yang besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari plafon dana alokasi umum yang diutamakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

“Dalam studi banding kami ke Philipina beberapa waktu lalu kami mendapati pulau-pulau terpencil di sana diberikan dana lebih di daerah-daerah perkotaan. Sementara di Indonesia, APBD DKI Jakarta saja 50 triliun, sedangkan APBD Daerah kepulauan hanya 2 triliun,” ungkap Politisi dari PDI Perjuangan ini.

Kata Alex, hal tersebut membuat perkembangan daerah perkotaan semakin dahsyat, sementara daerah kepulauan semakin tertinggal dan terisolir. Kondisi demikian yang terus menerus akan memunculkan kecemburuan dalam masyarakat yang akhirnya akan menumbuhkan bibit-bibit disintegrasi.

Sementara itu Sigit Sosiantomo, anggota Pansus dari FPKS mempertanyakan, jika memang untuk pembangunan daerah kepulauan itu diperlukan dana khusus, berapa besar dana tersebut.

“Selain dana, sebenarnya apakah hal minimal yang harus dimiliki oleh daerah-daerah tersebut, agar daerah kepulauan memiliki daya ungkit untuk mengejar ketertinggalan mereka,” tanya Sigit.

Menanggapi hal tersebut Mahendra berjanji akan membuat penjelasan yang lebih terinci secara tertulis. Namun lanjutnya, daerah kepulauan yang sebagian besar merupakan wilayah laut itu tentu yang harus dimaksimalkan adalah sumber daya kelautannya. Misalnya industri berbasis perikanan, dimana harus ada pabrik-pabrik ikan di dalamnya. Artinya, ikan dari nelayan tidak langsung dibawa eksportir besar ke daerah atau negara lain, melainkan harus lebih dahulu melalui masyarakat atau pengusaha setempat. Sehingga masyarakat setempat bisa mendapat hasil yang lebih besar dari sumber daya kelautannya.

“Selama ini, ikan hasil tangkapan masyarakat setempat dibeli dengan harga murah oleh pengusaha besar yang kemudian langsung dibawa ke daerah atau negara lain. Hal itu jelas merugikan masyarakat. Dengan adanya pabrik-pabrik ikan, akan membuat daya jual ikan dari masyarakat setempat meningkat, yang akhirnya penghasilan masyarakat kepulauan pun akan meningkat,” tutur Bambang menambahkan. (Ayu) foto:ry/parle

Komisi XI DPR Akan Tindaklanjuti Usulan Gubernur BI Baru



Anggota Komisi XI Kamaruddin Sjam.

Komisi XI DPR segera menindaklanjuti Usulan Calon Gubernur

BI Jumat (22/2) lalu, yang dikirim oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masa 2013-2018. Didalam surat bernomor R-07/Pres/02/2013 itu SBY mengusulkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai calon Gubernur BI untuk menggantikan Darmin Nasution yang akan berakhir pada 22 Mei besok.

Menyinggung soal pencalonan Agus Martowardojo sebagai calon tunggal Gubernur BI, Anggota Komisi XI Kamaruddin Sjam menilai Komisi XI DPR-RI hanya memiliki pilihan untuk menolak ataupun menerimanya. “Kita tahu, dia dulu di tahun 2008 pernah ditolak ketika dicalonkan untuk menjadi Gubernur BI, jadi untuk saat ini kami

perlu pelajari dulu alasan-alasan penolakannya di pencalonannya yang dulu,” jelas Kamarudin ketika ditemui di Sekretariat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Senayan (25/2).

Ia menambahkan, Komisi XI bisa saja menolak pencalonan Agus sebagai Gubernur BI, dan tidak dinilai tidak layak dari hasil *fit and proper test*nya. Sehingga harus dilihat dan ditekankan kinerja ekonomi nasional dahulu.

“Namun, proses *fit dan proper test*nya akan kita usahakan selesai dalam bulan Maret lah, kan pergantian Gubernur BI nanti di bulan Mei. Akhir Maret ini sudah harus selesai,” terang Kamarudin. (sf) foto: doc/parle.

DPR: Pemerintah Akan Jelaskan Perkembangan Tenaga Honorer



Wakil Ketua Komisi II DPR dari FPDIP Ganjar Pranowo.

DPR mengatakan pemerintah dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) akan memberikan penjelasan mengenai laporan perkembangan penanganan penyelesaian tenaga honorer kategori I dan II.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari FPDIP Ganjar Pranowo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/2) di sela rapat kerja Panitia Kerja (Panja) Honoror.

“Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) RI merupakan tindak lanjut

dari Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR tanggal 23 Januari 2013,” kata Ganjar.

Politisi dari PDIP mengatakan, dari jadwal Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, telah tersusun jadwal uji publik dan pelaksanaan ujian bagi tenaga honorer kategori II. “Seharusnya uji publik tenaga honorer kategori II dilaksanakan bulan Februari ini. Dan tesnya akan dilaksanakan April 2014. Tetapi kok malah ditunda menjadi Juli. Padahal jadwal sudah dibuat, kita masih simpan notulensi rapatnya. Harus ada kepastian lah,” ujarnya.

Ganjar menyesalkan Kementerian Keuangan yang tidak mengalokasikan anggaran proses seleksi tenaga honorer kategori II. “Ada *progress* (laporan kemajuan) tak menggembarakan. Menkeu tidak setuju untuk penyediaan anggaran untuk penyelesaian tes untuk tenaga honorer kategori II,” katanya.

Seperti diketahui, dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kemenpan & RB pada tanggal 23 Januari 2013 yang lalu, Kemenpan & RB mengatakan telah menetapkan prosedur penanganan tenaga honorer kategori I, menyusul diterbitkannya Keputusan Menetri PAN dan RB No. 1/2013.

Sekretaris Kemenpan & RB Tasdik Kinanto mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan, Tim Teknis Penanganan Pengaduan, dan Tim Pimpinan/Pengarah.

Sebagai pusat/tempat pengaduan berada di Kemenpan & RB atau melalui website. Namun pengaduan dapat disampaikan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) termasuk kantor regional, maupun BPKP beserta perwakilan, dan bisa juga ke Tim Pelaksana Pengaduan.

“Untuk pelayanan pengaduan, diatur dalam dua shift, yakni jam 09.00 – 12.00 dan jam 13.00 – 16.00 WIB,” ujar Tasdik.

Selain menjelaskan prosedur pengaduan, Tasdik Kinanto juga menyampaikan rencana kegiatan (*time table*) penyelesaian tenaga honorer kategori II, yang dimulai dengan penerimaan daftar nama tenaga honorer kategori II pada bulan Juni 2012 lalu.

Menurut Tasdik, jadwal tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu apabila telah dialokasikan anggaran pelaksanaannya. “Saat ini anggaran itu telah mendapat dukungan Komisi II DPR, dan diajukan kepada Menteri Keuangan, terakhir dengan surat susulan,” ujarnya. (nt)

Komisi V Serap Aspirasi Masyarakat Kaltim Terkait RUU Jasa Konstruksi

Komisi V DPR RI dipimpin Laurens Bahang Dama melakukan kunjungan spesifik ke Kalimantan Timur, Senin (25/2), dalam rangka menyerap aspirasi dari berbagai pihak terkait pembahasan RUU Jasa Konstruksi.

“Meskipun dalam Prolegnas berjudul RUU tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, namun dari sisi perancangan peraturan

perundangan, perubahan UU ini cenderung ke arah penggantian,” ungkap Laurens yang juga Ketua Komisi V DPR.

“Di sini kami datang untuk menyerap aspirasi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan jasa konstruksi, baik dari masyarakat maupun akademisi sehingga penyusunan rancangan revisi UU ini bisa sem-



Suasana pertemuan Tim Komisi V DPR dipimpin Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama dengan Pemprov dan DPRD Kaltim.

purna,” ujarnya.

Selain dengan Gubernur Kalimantan Timur, Walikota Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum, pertemuan tersebut juga mengundang Civitas Akademika dari berbagai Perguruan Tinggi di Kaltim.

Laurens mengatakan, UU yang telah berusia 13 tahun ini memang perlu diganti karena sudah tidak memadai, khususnya mengenai kejelasan tugas, pembagian peran dan pengaturan pelaksanaannya.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak memberi masukan mengenai kejelasan tugas pengelolaan lingkungan serta pihak mana yang bertanggungjawab atas pendirian bangunan. “Kegagalan bangunan konstruksi merupakan tanggung jawab penyedia jasa sedang kegagalan penggunaan bangunan adalah tanggung jawab pengguna jasa. Dalam hal ini perlu kejelasan,” usulnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Mohamad Nasir menegaskan tentang penguatan sanksi pada pelanggaran. “Seharusnya sanksi diperkuat, pidana diadakan, seperti misalnya Pasal 23, usaha jasa konstruksi tanpa ijin, yang hanya bersanksi administrasi, teguran tertulis tidak menimbulkan efek jera” jelasnya. Lebih lanjut mengenai pembinaan jasa konstruksi, menurutnya, harus jelas pada objek yang ditetapkan, siapa yang mendapat pembinaan.

Senada dengan itu, Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengingatkan agar semangat kedaerahan juga menjadi unsur dalam RUU, ini menyangkut upah dan material yang berbeda-beda pada setiap daerah.

“Harusnya ada aturan yang memberi peluang didirikannya pusat pelatihan di daerah-daerah, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia daerah,” harapnya. (ray)

Pembangunan Landasan di Biak Berikan Dampak Positif

DPR menilai dengan adanya RUU Keantariksaan, Biak-Papua dapat menjadi peta dunia. Diharapkan dengan adanya pembuatan landasan ini berdampak positif bagi masyarakat sekitar sehingga potensi daerah akan terekspos oleh masyarakat dunia.

“Dengan adanya landasan ini, masyarakat dunia mau melihat

langsung ke daerah ini, sehingga potensi daerahpun nantinya akan dikenal. Misalnya, masyarakat dunia banyak yang datang, pariwisata pun terangkat. Dari situ, kan banyak turunannya, termasuk sektor ekonomi pun nanti tersentuh, dengan adanya teknologi ini Sumber Daya Manusia (SDM) juga tumbuh,” jelas Jamaluddin Jafar (F-PAN) saat

ditemui Tim Parle di Bandara Frans Kaisiepo Biak-Papua, baru-baru ini.

Komisi VII juga telah mengatur tentang hal ini dalam RUU Keantariksaan, dimana ada satu pasal yang menjelaskan daerah itu bisa memanfaatkan keberadaannya dalam undang-undang ini. “Dampak positifnya sudah diatur dalam RUU, dan dampak negatifnya juga sudah



Suasana pertemuan Tim Panja RUU Keantariksaan Komisi VII DPR dengan Pemda Biak.

diantisipasi,” ujarnya.

Berkaitan dengan kontribusi bila ada landasan satelit disini kepada Pemda atau masyarakat di sekitar lokasi, Komisi VII mengaku sudah mengaturnya dalam RUU. Nantinya landasan hal ini sarat dengan teknologi, sehingga bisa menjadi kesempatan untuk warga setempat. “Adanya landasan ini juga bertujuan untukantisipasi terhadap benda-benda langit yang jatuh di wilayah Indonesia,” katanya.

Menurutnya, hal ini lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Bahkan, negatifnya pun tidak ada sama sekali walaupun muncul kekhawatiran di masyarakat mengenai rencana ini. “Ini juga menjadi tugas Lapan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana dampak positifnya,” tambah Jamaluddin.

Politisi Fraksi PAN ini menilai bahwa kekhawatiran masyarakat tidak usah terlalu berlebihan, karena dampak positif yang didapat lebih banyak daripada dampak negatif-

nya. Hal inilah yang menjadi tantangan untuk menjelaskan kepada masyarakat.

Ia menyayangkan proyek ini terkendala karena keterbatasan SDM setempat, namun ternyata di satu sisi masyarakat menginginkan proyek ini segera terealisasi. Tapi bukan berarti hal ini langsung menjadi mudah.

Dia menambahkan, sekarang ini kita berhadapan dengan UU Kepabeanan. Dalam masalah ini pihak Rusia tidak mau teknologinya diperiksa. “Mungkin Dia merasa khawatir teknologinya dijiplak, ini harus dinegosiasikan. Kita harus mengerti kenapa Rusia tidak mau, berarti ada hal-hal seperti teknologi yang mereka harus lindungi,” ujarnya.

Jamaluddin berharap dengan adanya landasan ini *stakeholder* terlayani dan akses masyarakat untuk produk antariksa pun tidak dibatasi atau semacamnya. Teknologi ini sangat dibutuhkan untuk Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan.

“Keuntungan lainnya dengan adanya satelit ini bisa dilacak daerah yang misalnya memiliki potensi ikan, itu kan efeknya langsung ke masyarakat. Untuk *stakeholder* misalnya, Angkatan Laut bisa digunakan untuk mendeteksi kapal laut termasuk penyelundup. Negara lain sudah maju kok kita ketinggalan terus,” jelasnya.

Sementara Bupati Biak Alimuddin Sabe dalam pertemuannya dengan Tim Panja RUU Keantariksaan Komisi VII DPR mengharapkan, kedatangan Panja RUU Keantariksaan Komisi VII DPR ke Lapan Biak bisa mendapatkan masukan untuk pengembangan potensi kedirgantaraan Lapan di wilayah Kabupaten Biak Numfor.

Kunjungan Tim Panja RUU Keantariksaan Komisi VII DPR di Lapan Biak sangat strategis untuk menggali informasi kedirgantaraan kelengkapan Panja RUU Keantariksaan Komisi VII DPR,” ujarnya. (iw)/
foto:iwan armanias/parle.

Ketua DPR Lantik Sekjen dan Wasekjen DPR RI

Setelah satu bulan menyandang predikat Plt atau pelaksana tugas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI. Senin (25/2) Winantuningtyastiti resmi menjadi Sekjen DPR RI yang baru, menggantikan Nining Indra Saleh.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Winantuningtyastiti sebagai Sekjen DPR RI dan Achmad Djuned sebagai Wakil Sekjen dilakukan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie dengan didampingi Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Pra-

mono Anung, dan Shohibul Iman.

Dalam kesempatan tersebut, Marzuki Alie mengungkapkan segyanya pelantikan akan dilakukan esok hari, Selasa (26/2), namun karena hari ini (Senin) akan diadakan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR



Pelantikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Winantuningtyastiti dan Wakil Sekjen Achmad Djuned.

RI dengan Presiden, maka acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekjen dan Wasekjen dimajukan waktunya.

“Seyogyanya Pelantikan akan diadakan esok hari, namun karena hari ini pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden di Istana Negara, agar Ibu Sekjen DPR yang baru tidak lagi sebagai Plt atau Pelaksana tugas, maka pelantikan Sekjen yang baru dimajukan menjadi hari ini,” jelas Marzuki.

Dalam sambutannya, Marzuki

juga berharap agar Sekjen dan Wasekjen dapat duduk bersama menjalankan tugas pokok dan fungsi kesetjanaan. Meski wewenang penuh ada pada Sekjen, namun pembagian tugas yang jelas akan sangat membantu dalam menjalankan tupoksi kesetjanaan.

Di akhir sambutannya politisi Partai Demokrat ini berpesan agar Sekjen dan Wasekjen berlaku jujur. “Sekarang ini sulit sekali mendapatkan orang yang jujur dan amanah, untuk itu saya berpesan agar Sekjen dan Wasekjen berlaku jujur, agar semuanya berakhir dengan

khusnul khotimah,” kata Marzuki.

Sementara itu, Winantuningtyastiti yang akrab dengan sapaan Win mengatakan, pelantikan dirinya sebagai sebuah kepercayaan dari lembaga terhormat ini. Dia bersyukur pelantikan dirinya berjalan lancar. Ke depan ia berharap bantuan dan kerjasama dari semua jajaran Setjen DPR agar bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi sebaik-baiknya.

“Alhamdulillah, saya bersyukur karena saya sudah tidak dipanggil Plt lagi, karena satu bulan saya dipanggil Ibu Plt. Sekarang saya sudah betul-betul menjadi Sekjen. Seperti arahan Pak Ketua tadi agar dukungan terhadap anggota dewan terus ditingkatkan lagi. Untuk program-program yang sudah berjalan dengan baik dilanjutkan, dan kalau ada yang harus dibenahi akan kita benahi. Salah satunya reformasi birokrasi. Mohon doanya ya..” papar Win.

Di jajaran Sekretariat Jenderal Winantuningtyastiti dan Achmad Djuned memang bukan orang baru. Sebelumnya Win menjabat sebagai Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan. Sementara Achmad Djuned menjabat sebagai Deputy Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen. Hingga akhirnya Senin (25/2) keduanya resmi menjadi Sekjen dan Wakil Sekjen DPR RI. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi I DPR Minta Penjelasan Komprehensif Terkait Penembakan di Papua

Komisi I DPR Meminta penjelasan komprehensif kepada TNI dan Kepala BIN terkait Penembakan dan penyerangan terhadap aparat TNI, Polri dan masyarakat sipil di Papua.

“Ini bukanlah kejadian pertama yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir. Artinya kita tidak menginginkan kejadian terus berlanjut namun jika kita melihat kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Papua, yang pada waktu kita melakukan Rapat dengan BIN beberapa waktu lalu. Sudah teridentifikasi secara

komprehensif, terhadap kelompok-kelompok bersenjata baik yang bersifat ideologis politis, maupun kelompok-kelompok bersenjata yang cenderung mengarah kepada kelompok kriminal,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat Raker dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, di Gedung Nusantara I, Senin, (25/2).

Menurutnya, Persoalan Papua sudah kompleks karena bukan hanya persoalan keamanan tapi juga ada dimensi politik, ekonomi, sosial yang saling terkait satu



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq sebelum Raker dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono didampingi Kepala BIN.

dengan yang lain.

“Karena itu kita ingin dalam Raker ini ingin mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI dan Kepala BIN mengenai peristiwa tersebut, walaupun dari mabas Polri sudah menyatakan pelakunya adalah orang tidak dikenal yang cenderung mengarah kriminal. Itu perspektif dari polisi, kita ingin mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif TNI menyikapi persoalan ini dan jajaran Intelijen,” paparnya.

Selanjutnya, yang jauh lebih strategis, terang Mahfudz, adalah bagaimana menyusun langkah-langkah

sistemik termasuk kebijakan kedepan agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. “Kita ingin penyerangan terhadap Pihak TNI dapat diantisipasi kedepannya,” harapnya.

Pertemuan ini, lanjutnya, menjadi input penting bagi kita dalam mengambil kebijakan terhadap persoalan di Papua. “Ini bukan hanya Komisi I tetapi juga DPR sebagai institusi dapat menghadirkan solusi komprehensif tentang Papua secara damai dan bermartabat,” katanya.

Berikutnya, yaitu bagaimana menangani kelompok-kelompok bersenjata yang mengganggu keamanan dengan menciptakan keresahan masyarakat sehingga pada tingkat nasional muncul menjadi isu yang kontra produktif.

Pada kesempatan itu, DPR RI juga mengucapkan belasungkawa dan rasa keprihatinan atas meninggalnya delapan prajurit TNI dan warga sipil di Papua. “Kami, Komisi I DPR mengucapkan rasa keprihatinan dan belasungkawa atas gugurnya prajurit terbaik TNI di Papua,” ujarnya.

Dia menambahkan, Komisi I DPR juga berdoa semoga keluarga prajurit yang gugur diberikan ketabahan dan kesabaran semoga seluruh pengabdian prajurit yang gugur diterima oleh Tuhan YME. (as), foto : od/parle/hr.

Sumbar Bisa Jadi Pusat Studi Konstruksi



Tim Komisi V dipimpin Wakil Ketua Komisi V Mulyadi mengunjungi Kabupaten Limapuluhkota, Sumbar.

Sejumlah proyek konstruksi saat ini sedang dibangun dan dipersiapkan di Provinsi Sumatera Barat. Keberhasilan pembangunan Jembatan Layang Kelok 9, Terowongan Balingka-Ngarai Sianok sepanjang 1 km, jembatan Ngarai Sianok dengan tiang pancang sangat tinggi akan menempatkan daerah ini menjadi pusat

studi konstruksi.

“Jadi akan sangat lengkap jenis konstruksi yang ada di Sumbar, ada terowongan, ada jembatan Ngarai Sianok dengan tiang pancang sangat tinggi, ada Jembatan Kelok 9. Ini akan jadi pusat studi di bidang konstruksi, mahasiswa teknik sipil akan belajar di sini,” kata Wakil Ketua Komisi V Mulyadi saat memimpin kunjungan kerja ke Kabupaten Limapuluhkota, Sumbar, Jumat (22/2/13).

Terowongan Balingka-Ngarai Sianok yang diproyeksikan mendukung arus lalu lintas dari Sumbar ke Sumut. Saat ini memasuki tahap *design* dengan anggaran Rp.12,5 miliar dan dijadwalkan tuntas tahun 2013 ini. “Kita tidak usah bicara Eropa,

Jepang dan Korea saja mereka sudah membangun terowongan. Kenapa? Karena terowongan tidak mengganggu lingkungan, tidak mengambil lahan produktif,” tandasnya.

Sedangkan Jembatan layang Kelok Sembilan dibangun di antara bukit terjal dengan lahan yang sempit. Proyek konstruksi fenomenal yang menghubungkan Provinsi Sumbar dan Riau ini dibangun dengan konsep *Nature and Engineering in Harmony*. Di lahan jalan lama akan dibangun taman bunga sehingga ke depan dapat menjadi kawasan wisata.

Anggota Tim Kunker Komisi V dari Fraksi PD, Etha Bulu mendukung geliat konstruksi di Sumbar. Ia berharap pembangunan tersebut tetap memperhatikan keseimbangan tata ruang. “Jangan mengorbankan tanah produktif, pembangunan harus memperhatikan tata ruang,” tegasnya. (iky)

Komisi VII Desak LAPAN Tingkatkan Kemampuan Penginderaan Wilayah Nusantara



Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana memimpin kunjungan Tim Komisi VII ke Lapan Parepare, Sulsel.

Komisi VII DPR RI menginginkan Balai Penginderaan Jauh Parepare Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) meningkatkan kemampuan dalam melakukan penginderaan seluruh wilayah nusantara.

“Hasil data-data penginderaan daratan maupun lautan Balai Penginderaan Jauh Parepare LAPAN, wajib menjadi rujukan setiap lembaga pemerintah yang terkait,” kata Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana, Rabu (20/2).

Balai Penginderaan Jauh Parepare LAPAN perlu memperhatikan dengan baik setiap kerjasama nasional dan internasional. “Kemanfaatan hasil penginderaan LAPAN untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, Pengembangan Teknologi Penginderaan dan Kemanusiaan, termasuk dalam meningkatkan PNPB,” katanya.

Dalam rangka meningkatkan peran dan tugas-tugas penginderaan, Balai Penginderaan Jauh Parepare perlu menata sistem karir dan penempatan eselonisasi yang sesuai dengan beban pekerjaannya.

“Komisi VII DPR RI mengunjungi Balai Penginderaan Jauh Pare-Pare LAPAN, lembaga-lembaga khusus yang bertugas menjalankan misi keantariksaan, guna mendapatkan masukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan,” tegas Sutan Politisi Partai Demokrat ini.

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Panja RUU Tentang Keantariksaan, ke Balai Penginderaan Jauh Parepare LAPAN di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Jhonny Allen Marbun (F-PD), Teuku Irwan (F-PD), Didik Salmijardi (F-PD), Ismayatun (F-PDIP), Rofi Munawar (F-PKS), Tommy Andrian Firman (F-PPP), Mulyadi (F-P.Gerindra), Ali Kastella (F-P.Hanura).

Dalam menyusun dan menyempurnakan RUU Keantariksaan, Anggota Komisi VII Mulyadi mengatakan Komisi VII DPR RI memperhatikan Undang-undang Penerbangan, Undang-undang tentang LAPAN, Undang-undang tentang Penelitian dan undang-undang lain yang dianggap perlu.

Selanjutnya, Komisi VII secara khusus mempertimbangkan klausul kerjasama antar negara dalam pemanfaatan satelit. “Khususnya untuk tujuan-tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Kemanusiaan dan Pengembangan Teknologi Keantariksaan,” jelas Mulyadi politisi Partai Gerindra. (as), foto : as/parle/hr.

Taufik Kurniawan: Anggaran Riset Patut Ditingkatkan

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai semangat generasi muda untuk melakukan riset dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Itu dapat dilihat dari bertambahnya peminat kompetisi dibidang ini di tanah air dan keberhasilan periset muda Indonesia meraih medali dalam sejumlah kompetisi tingkat dunia. Pemerintah dan DPR menurutnya patut memberikan apresiasi dengan meningkatkan anggaran riset agar upaya para peneliti muda ini dapat berkelanjutan.



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyerahkan cinderamata kepada perwakilan peserta Indonesian Science Project Olympiad (ISPO).

“Saya berharap kompetisi yang ada jangan sekedar rutinitas, Mendikbud harus menyiapkan program lanjutan. Jangan hanya sekedar juara kompetisi kemudian selesai tetapi tidak ada tindak lanjut terkait penemuan *science*, teknologi, dan lingkungan itu. Saya minta teman-teman di Komisi X agar mendukung peningkatan *budget*,” kata Taufik kepada wartawan usai menerima audiensi serta jamuan makan malam 500 peserta *Indonesian Science Project Olympiad* (ISPO) di Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2/13).

Ia menambahkan kecintaan para peserta ISPO pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwujudkan dengan berbagai macam riset akan menghasilkan program ilmiah yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Baginya keterlibatan peneliti muda mulai dari tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK se-Indonesia telah membuka mata masyarakat tentang eksistensi generasi muda.

“Adik-adik peserta ISPO telah menunjukkan generasi muda kita ini tidak larut dalam *euforia*, melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat. Yang kita lihat malam ini adalah generasi muda yang bertanggungjawab dan telah memberikan kontribusi bagi perkembangan Indonesia dimasa yang akan datang,” kata Taufik dalam sambutannya dan langsung disambut tepuk tangan meriah peserta yang memenuhi ruang Pustaka Loka.

Politisi PAN ini meyakini penyelenggaraan ISPO bagi para pelajar dari seluruh Indonesia seperti meniupkan optimisme bahwa kita mampu bersaing dengan penelitian-penelitian yang dilakukan di manca negara. Ia menekankan semangat melakukan riset tidak boleh berhenti sampai di sini, *follow up* juga mesti dikawal sampai dapat memproduksi hingga *end user* yang kom-

petitif. Baginya lomba semacam ini perlu diperbanyak dan harus berkelanjutan agar tradisi melakukan riset tumbuh sejak dini.

Sebelumnya Ketua Dewan Juri ISPO, Prof. DR. Ir. Riri Fitri Sari menjelaskan kompetisi riset ini bertujuan mendorong para remaja untuk mencintai ilmu pengetahuan, membudayakan berfikir ilmiah, melakukan penelitian, mengembangkannya dan menghasilkan produk ilmiah. ISPO fokus pada kegiatan olimpiade proyek penelitian dalam bidang sains, teknologi dan komputer. Pada kompetisi yang memasuki tahun kelima ini telah masuk 986 proyek penelitian yang datang dari 173 sekolah dari 23 provinsi di Indonesia. 150 proyek penelitian ditetapkan sebagai finalis dan diundang ke Jakarta untuk mempresentasikan proyeknya.

“Peneliti muda pemenang ISPO sebelumnya telah dikirim mengikuti sejumlah kompetisi di dunia. Sepanjang tahun 2009-2012 lalu mereka telah berhasil mengharumkan nama bangsa dengan meraih prestasi cemerlang di ajang olimpiade proyek penelitian tingkat internasional,” papar Guru Besar dari Universitas Indonesia ini.

Prestasi itu antara lain medali emas dan perak dari I-SWEEEP (*International Sustainable World Energy, Engineering, Environment Project Olympiad*) di Amerika Serikat, medali emas dan perak dari IYIPO (*International Young Inventor Project Olympiad*) di Georgia dan medali emas dari ISTE-MOSTRAREC (*International Science and Techology Exhibition*) di Brazil. Pemenang ISPO 2013 yang diumumkan di Sasono Langeng Budoyo TMII, Jakarta pada Kamis (28/2) juga akan memperoleh kesempatan mempertandingkan hasil risetnya di ajang kompetisi tingkat dunia. (iky)



Ketua DPR Marzuki Alie memberikan keterangan pers usai konsultasi dengan Presiden RI. Foto: hd /parle.



Pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua DPR Sohibul Iman. Foto: hd /parle.



Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat menerima kunjungan Ketua Parlemen Nasional Sudan He. Mr. Ahmed Ibrahim El-Tahir. Foto: wy /parle.



Ketua Parlemen Nasional Sudan He. Mr. Ahmed Ibrahim El-Tahir mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta. Foto: wy /parle.



Suasana rapat Timwas Century DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi Priyo Budi Santoso dengan Pimpinan KPK. Foto: iw /parle.

